



Kuota Siswa SMPN 10 Ditambah

■ Pemkot Yogya Perluas Akses Sekolah Negeri di Sisi Selatan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah konkret dalam menjawab keluhan masyarakat di wilayah selatan terkait minimnya ketersediaan bangku sekolah negeri. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 mendatang, Pemkot resmi menambah kuota kursi di SMP Negeri 10 Yogyakarta sebagai solusi jangka pendek untuk menekan ketimpangan distribusi sekolah menengah di Kemantren Umbulharjo.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama yang tidak akan terkena kebijakan efisiensi anggaran. Sebaliknya, anggaran pendidikan justru dinaikkan demi memperluas akses bagi warga masyarakat kurang mampu, termasuk untuk menambah jumlah kelas sekolah negeri.

"Pendidikan tidak akan dipangkas, bahkan anggarannya naik. Karena kami harus membangun (gedung) SMP baru yang ada di Umbulharjo. Tahun ini sudah mulai terima siswa," katanya, belum lama ini.

Meski pembangunan fisik membutuhkan waktu, Hasto

mengatakan, demi memenuhi kebutuhan warga Umbulharjo akan sekolah negeri yang gratis dan berkualitas, kebijakan yang sedikit "memaksa" pun harus ditempuh. Alhasil, sebagai solusinya, para siswa baru SMP Negeri 10 nantinya akan memanfaatkan gedung sekolah dasar (SD) di wilayah sekitar yang kapasitasnya masih berlebih.

"Saya paksakan sedikit, meskipun belum punya gedung, kita terima siswa, kita pakai gedung SD dulu supaya Umbulharjo ini kecukupan SMP negerinya. Kemudian, nanti SD yang bisa tambah siswa, saya blikinkan ruangan lebih bagus, karena untuk efisiensi dalam bidang pendidikan masyarakat bisa sekolah negeri tapi dengan gratis, tidak perlu banyak bayar," ungkapnya.

Bukan tanpa alasan, berdasarkan data Pemkot Yogyakarta, terdapat kesenjangan sekitar 1.000 kursi kosong di jenjang SD negeri, dari total kapasitas 3.700 kursi. Menurutnya, belakangan semakin marak fenomena warga masyarakat yang lebih mengidolakan sekolah swasta, meski konsekuensinya harus merogoh kocek lebih dalam.

"Nah, sebetulnya sayang

kalau mereka yang sudah nggak mampu tapi memaksakan diri ke sekolah bayar (swasta). Padahal, kita punya kelas, punya kursi sekolah negeri yang nggak bayar, begitu lho," tandas Wali Kota.

Blank spot
Langkah tersebut diambil untuk merespons potensi "blank spot" atau minimnya ketersediaan bangku sekolah negeri di wilayah Kemantren Umbulharjo yang selama ini dikeluhkan warga. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menuturkan, upaya mengoptimalkan kapasitas yang sudah ada cenderung lebih realistis, dibanding harus membangun sekolah baru.

"Jadi, penambahan kapasitas. Rombelnya (rombongan belajar) ditambah, ruang kelas ditambah daya tampungnya. Khusus untuk SMP 10, ditambah dua rombel," ujarnya.

Budi menjelaskan, penambahan dua rombel secara otomatis akan mengerek total daya tampung SMP Negeri di seluruh Kota Yogyakarta pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026. Jika sebelumnya total kuota berada di angka 3.520 kursi, penerimaan siswa mendatang akan ada penambahan sebanyak 64 slot menjadi 3.584 kursi.

"Sementara, di Umbulharjo itu (SMP Negeri) cuma satu, SMP 10 saja. Sehingga, ini sebetulnya untuk menambah akses bagi warga Kota Yogyakarta yang tempat tinggalnya di selatan," pungkasnya. **(aka)**

SOLUSI JANGKA PENDEK

- Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah konkret dalam menjawab keluhan masyarakat di wilayah selatan terkait minimnya ketersediaan bangku sekolah negeri.
- Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 mendatang, Pemkot menambah kuota kursi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
- Hal ini sebagai solusi jangka pendek untuk menekan ketimpangan distribusi sekolah menengah di Kemantren Umbulharjo.

na Tugas (Dit) Kepala Kamul Kemendat... bentuk simulasi nyata hasil jemaah... dibesarkan...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005